
**ANALISIS REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN MINAHASA****ANALYSIS OF REALIZATION OF BUDGET REVENUE AND EXPENDITURE OF THE REGIONAL
GOVERNMENT OF MINAHASA REGENCY**

Oleh:

**Andre P. Tulangow¹
Treesje Runtu²**^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi ManadoEmail: ¹andretulangow1995@gmail.com
²truntu@gmail.com

Abstrak: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sistem akuntansi pemerintah adalah rangkaian sistematis dan prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintah. Dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis anggaran pendapatan dan belanja pemerintah Kabupaten Minahasa, dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis data yang memiliki sifat deskriptif. Hasil penelitian pada APBD Kabupaten Minahasa, menunjukkan bahwa dalam tiga tahun penelitian pemerintah Kabupaten Minahasa belum terlalu baik dalam merealisasikan pendapatan daerahnya. Berbeda dengan belanja daerah, dalam tiga tahun penelitian pemerintah kabupaten Minahasa sudah baik dalam merealisasikan belanjanya dengan tidak melebihi dengan jumlah yang dianggarkan.

Kata Kunci: anggaran pendapatan dan belanja daerah

Abstract: Budget income and Expenditure area (APBD), the annual financial plan is a local government in Indonesia which was approved by the House of Representatives of the region. APBD are set by local regulations. Fiscal year APBD covering a period of one year, starting from 1 January up to 31 December. The Government's accounting system is the systematic arrangement and procedures, organizers, tools, and other elements to realize the function of an accounting transaction analysis since up to financial reporting surroundings government organizations. With the aim to know and analyze the budget revenue and Government spending Minahasa Regency, with research methods used are methods of data analysis that has descriptive nature. The results of research on APBD Minahasa Regency, showed that in the three year Government study has not been too well the Minahasa Regency in realization of income regions. In contrast to shopping districts, within three years of the Regency of Minahasa government research is already well within the realization of shopping with does not exceed budgeted amounts.

Keywords: budget revenue and spending areas

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan suatu negara untuk lebih maju dilaksanakan melalui pembangunan nasional secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu bagian penting dari pembangunan nasional adalah pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi pada dasarnya mengoptimalkan peranan sumber daya dalam menciptakan kenaikan pendapatan pada sektor-sektor ekonomi dan mengusahakan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional yang dilaksanakan membutuhkan anggaran belanja pada setiap periode. Seiring dengan peningkatan pembangunan nasional maka anggaran belanja yang diperlukan juga semakin meningkat. Anggaran belanja tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya dan pendapatan yang dimiliki oleh suatu daerah. Anggaran pendapatan dan belanja yang dikumpulkan dituang dalam suatu program atau rancangan pemerintah yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintah.

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis anggaran pendapatan pemerintah Kabupaten Minahasa periode tahun 2013-2015 dan untuk mengetahui dan menganalisis anggaran belanja pemerintah Kabupaten Minahasa selama periode 2013-2015.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Mursyidi (2010:17) menyatakan bahwa akuntansi adalah proses pengidentifikasian data keuangan, memproses pengolahan dan penganalisisan data yang relevan untuk diubah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pembuatan keputusan.

Akuntansi Sektor Publik

Sujarweni (2015:1) menyatakan akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan di butuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya. Menurut Bastian (2010:3) akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan social maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

Akuntansi Pemerintahan

Nordiawan, dkk (2012:4) menjelaskan bahwa akuntansi pemerintahan menghususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi dalam badan pemerintahan. Sadeli (2015:6) menyatakan akuntansi pemerintahan termasuk pula akuntansi lembaga-lembaga nonprofit atau *institutional accounting*, menghususkan pada masalah pencatatan dan pelaporan transaksi dari unit-unit pemerintah dan organisasi nonprofit

lainnya. Akuntansi pemerintahan diatur dalam PP. No 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Tujuan dari Standar Akuntansi Pemerintahan adalah:

- a. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang di terapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
- b. SAP disusun dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara.
- c. SAP berlaku untuk pemerintah pusat dan daerah.

Anggaran

Budidarma (2010:20) menjelaskan anggaran berasal dari kata budget (Inggris), sebelumnya dari kata bougette (Perancis) yang berarti "sebuah tas kecil". Anggaran dalam arti luas meliputi jangka waktu anggaran direncanakan, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. Anggaran dalam arti sempit meliputi rencana penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun saja. Penganggaran (budgeting) merupakan aktivitas mengalokasikan sumberdaya keuangan yang terbatas untuk pembiayaan belanja organisasi yang cenderung tidak terbatas. Anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan dan keuangan periodik (biasanya dalam periode tahunan) yang berisi program dan kegiatan dan jumlah dana yang diperoleh (penerimaan/pendapatan) dan dibutuhkan (pengeluaran/ belanja) dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Analisis Pendapatan Daerah

Hariadi Pramono, Yanuar Restianto (2010:30) menyatakan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pememrintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Dengan tingkat kemandiraian yang lebih besar berarti daerah tidak akan lagi sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan propinsi melalui dana perimbangan. Namun tidak berarti kemandirian keuangan daerah tinggi sudah tidak memerlukan dana perimbangan. Dana perimbangan masi tetap diperlukan untuk mempercepat pembangunan daerah. Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan maka daerah melakuakn pelyanan publik yang berkualitas, melakukan investasi pembengunan jangka panjang, dan sebagainya. Oleh karena itu perhatiannterhadap manajemen pendapatan dan analisis pendapatan daerah menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah.

Analisis Belanja Daerah

Analisis belanja daerah sangat penting di lakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah melakukan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif (*value for money*). Sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran secara tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran.

Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Ramlah Basri (2014), dalam penelitiannya berjudul Analisis penyusunan anggaran dan laporan realisasi anggaran pada BPM-PD Provinsi Sulawesi utara. Tujuannya Untuk mengetahui proses penyusunan anggaran dan laporan realisasi anggaran pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil Penelitian Hasil penelitian dalam pembahasan KUA/PPAS dengan TAPD tidak diikuti oleh semua bidang yang ada di BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara. Proses penyusunan anggaran BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara telah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 dan No. 22 Tahun 2011. Realisasi anggaran BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2012 sebesar 95, 30 %. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada objek penelitian.
2. Riska Korompot (2015), dalam penelitiannya berjudul Analisis Penyusunan Anggaran Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014. Tujuannya Untuk mengetahui proses penyusunan anggaran di DPPKAD kota kotamobagu tahun anggaran 2014.. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian Diperoleh DPPKAD kota Kotamobagu telah melaksanakan proses penyusunan anggaran sesuai dengan permendagri No.27 tahun 2013 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2014, namun belum merampungkan proses penyusunan APBD dalam siklus anggaran daerah tetapi masih dalam bentuk standar operasional prosedur. Perbedaan dengan penelitian ini ada pada objek penelitian.

3. Penelitian oleh Yohanes Y. Subiantoro (2011), dalam penelitiannya berjudul Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pada Badan Perencanaan Dan Pembangunan Kota (Bappeko) Kota Mojokerto. Tujuannya adalah untuk memperoleh bukti empiris apakah penerapan anggaran berbasis kinerja dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja BAPPEKO di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara simultan maupun secara parsial penerapan anggaran berbasis kinerja dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja BAPPEKO di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian.
4. Penelitian oleh Komang Sri Endrayani (2014), dalam penelitiannya berjudul Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah Kota Singaraja). Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Ketika penerapan anggaran berbasis kinerja dilakukan semakin baik, maka semakin besar pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian.
5. Penelitian oleh Indriani Yulia Friska (2013), dalam penelitiannya berjudul Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi). Tujuannya adalah untuk mencari bukti empirik apakah penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Jambi dengan menggunakan komitmen organisasi sebagai variabel moderasinya. Metode penelitian Analisis Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan, implementasi, pelaporan anggaran, dan evaluasi kinerja berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan secara parsial hanya variabel implementasi dan pelaporan saja yang berpengaruh positif. Perbedaan Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.
6. Penelitian oleh Gita Soraya (2014), dalam penelitiannya berjudul Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Dan Sistem Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Pertanahan Nasional Wilayah Sumatera Selatan. Tujuannya adalah Untuk mengetahui pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Badan Pertanahan Nasional Wilayah Sumatera Selatan. Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja dimana $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $19,165 > 3,295$. Variabel bebas terhadap Akuntabilitas Kinerja mempunyai kontribusi sebesar 54,5 persen, sedangkan 45,5 persen dipengaruhi oleh faktor lain diluar model. Perbedaan pada metode analisis data.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam studi ini adalah deskriptif kualitatif, untuk menjelaskan dan menganalisis Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Mei-September tahun 2016

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah metode analisis data yang memiliki sifat deskriptif. Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran tentang APBD pemerintah Kabupaten Minahasa T.A 2013-2014 dan membandingkan data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut dengan landasan teori dari literatur kemudian menarik kesimpulan dari apa yang telah didapat dari penelitian tersebut dan memberikan beberapa saran.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Hasil Penelitian****1. Pendapatan****Tabel 1. Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa**

Tahun	Jumlah (Rp)		
	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	(%)
2013	804.942.568.878,00	804.782.048.619,00	99,98
2014	940.706.099.779,00	932.580.474.934,61	99,14
2015	1.129.777.100.976,00	1.128.598.692.649,39	99,90

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah kab.Minahasa

Pada tabel 1. merupakan hasil penelitian tentang realisasi pendapatan daerah Kabupaten Minahasa (berupa, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah) selama periode tahun 2013-2015. Pemerintah Kabupaten Minahasa belum terlalu baik dalam merealisasikan pendapatan daerah. Selama periode tahun 2013-2015 realisasi pendapatan pemerintah Kabupaten Minahasa tidak mencapai jumlah yang telah dianggarkan. Presentase, tahun 2013 sebesar 99,98%, tahun 2014 sebesar 99,14%, tahun 2015 sebesar 99,90%.

2. Belanja**Tabel 2. Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa**

Tahun	Jumlah (Rp)		
	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	(%)
2013	859.902.391.065,00	785.873.005.428,00	91,39
2014	1.014.575.315.157,00	915.309.677.767,00	90,22
2015	1.220.916.696.900,00	1.092.126.832.265,00	89,45

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah kab.Minahasa

Pada tabel 2. merupakan hasil penelitian Analisis Varians Pendapatan Kabupaten Minahasa periode tahun 2013-2015 tentang realisasi belanja daerah pemerintahan Kabupaten Minahasa (berupa, belanja tidak langsung, dan belanja langsung). Pemerintah Kabupaten Minahasa sudah dikatakan baik dalam merealisasikan belanja daerahnya. Dilihat dari realisasi belanja daerah pemerintah Kabupaten Minahasa tidak melebihi dengan jumlah yang dianggarkan. Presentase tahun 2013 sebesar 91,39%, tahun 2014 sebesar 90,22%, tahun 2015 sebesar 89,45%.

3. Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Minahasa**Tabel 3. Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Minahasa**

Tahun	PAD (Rp)	Total Pendapatan Daerah	%
2013	31.964.854.060	804.782.048.619	3,97
2014	58.778.368.164,61	932.580.474.934,61	6,30
2015	73.125.539.559,39	1.128.598.692.649,39	6,47

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah kab.Minahasa

Tabel 3. menyatakan bahwa derajat desentralisasi kabupaten Minahasa dapat dikatakan masi rendah. Tingkat derajat desentralisasi pada tahun 2013 sebesar 3,97%, tahun 2014 sebesar 6,3%, tahun 2015 sebesar 6,47%. Tanggung jawab yang diberikan pememrintah pusat kepada pemerintah kabupaten Minahasa untuk menggali dan mengolah pendapatan masi dikatakan rendah.

4. Rasio Eektivitas Pajak Daerah Kabupaten Minahasa

Tabel 4. Rasio Eektivitas Pajak Daerah Kabupaten Minahasa

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2013	11.638.218.000	12.660.073.024	108,78
2014	18.872.596.871	19.468.059.670	103,16
2015	24.119.850.000	24.792.193.897	102,79

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah kab.Minahasa

Tabel 4. diatas dapat dilihat rasio eektivitas pajak daerah yaitu tahun 2013 sebesar 108,78%, tahun 2014 sebesar 103,16%, tahun 2015 sebesar 102,79%. Presentase diatas pemerintah kabupaten Minahasa cukup efektif dalam merealisasikan pajak daerahnya yaitu melebihi dengan jumlah yang dianggarkan.

5. Belanja Langsung Kabupaten Minahasa

Tabel 5. Belanja Langsung Kabupaten Minahasa

Tahun	Belanja Langsung (Rp)	Total Belanja(Rp)	%
2013	266.302.699.200	785.873.005.428	33,88
2014	331.430.404.312	915.309.677.767	36,20
2015	404.029.982.298	1.092.126.832.265	36,99

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah kab.Minahasa

Tabel 5. belanja langsung Kabupaten Minahasa (berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal) dengan presentase tahun 2013 sebesar 33,88%, tahun 2014 sebesar 36,20%, tahun 2015 sebesar 36,99%. Dan dari tiga tahun penelitian tersebut sebagian besar dana dialokasikan untuk belanja modal.

6. Belanja Tidak Langsung Daerah Kabupaten Minahasa

Tabel 6. Belanja Tidak Langsung Daerah Kabupaten Minahasa

Tahun	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Total Belanja(Rp)	%
2013	519.570.306.228	785.873.005.428	66,11
2014	583.879.273.455	915.309.677.767	63,79
2015	688.086.849.967	1.092.126.832.265	63,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah kab.Minahasa

Tabel 6. belanja tidak langsung Kabupaten Minahasa (berupa belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan social, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga) dengan presentse tahun 2013 sebesar 66,11%, tahun 2014 sebesar 63,79%, tahun 2015 sebesar 63,00%. Dan dari tiga tahun penelitian tersebut sebagian besar dana dialokasikan untuk belanja pegawai.

7. Rasio Efisiensi Belanja Kabupaten minahasa

Tabel 7. Rasio Efisiensi Belanja Kabupaten minahasa

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2013	859.902.391.065	785.873.005.428	91,39
2014	1.014.575.315.157	915.309.977.767	90,22
2015	1.220.916.696.900	1.092.126.832.265	89,45

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah kab.Minahasa

Data diatas dapat dikatakan bahwa pemerintah kabupaten Minahasa dapat mengendalikan belanja daerahnya dengan tidak ada pemborosan dana. Dengan presentase tahun 2013 91,39% tahun 2014 90,22% tahun 2015 89,45%.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil penelitian telah didapat dan disimpulkan, bahwa Realisasi Kinerja pendapatan daerah pemerintahan Kabupaten Minahasa dilihat dari sisi pendapatan dengan menggunakan analisis varians tahun 2013-2015 dapat dikatakan kurang baik, karena realisasinya tidak mencapai jumlah yang dianggarkan. Realisasi ditahun 2013 sebesar Rp.804.782.048.619,00 tahun 2014 sebesar Rp.932.580.474.934,61, tahun 2015 sebesar Rp. 1.128.598.692.649,39, dan tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa dapat dikatakan masih rendah. Ini berarti pemerintah Kabupaten Minahasa masi kurang memberikan perhatian dalam mengengola dan menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang ada di Kabupaten MINahasa. Pajak daerah Kabupaten Minahasa dapat dikatakan baik karena selalu melebihi jumlah yang dianggarkan setiap tahunnya. Berarti pemerintah Kabupaten Minahasa cukup evektif dalam merealisasikan pajak daerah dan bisa berdampak baik bagi pendapatan daerah. Realisasi Kinerja belanja pemerintah Kabupaten Minahasa dilihat dari analisis varians secara umum dapat dikatakan baik karena tidak melebihi dari jumlah yang dianggarkan. Ini berarti kinerja belanja Kabupaten Minahasa dapat dikatakan terealisasikan denan baik. Presentase tahun 2013 sebesar Rp. 785.873.005.428, tahun 2014 sebesar Rp. 915.309.977.767, tahun 2015 sebesar Rp. 1.092.126.832.265. Keserasian belanja daerah Kabupaten Minahasa, sebagian besar dana pemerintah dialokasikan untuk belanja tidak langsung dibandingkan dengan belanja langsung. Belanja pegawai mendapat alokasi dana terbanyak selama periode tahun penelitian. Kinerja keuangan Kabupaten Minahasa cukup baik dengan dalam mengendalikan belanja daerahnya. Dengan presentase tahun 2013 sebesar 91,39% tahun 2014 sebesar 90,22% tahun sebesar 2015 89,45%.

Saran

Pemerintah Kabupaten Minahasa harus lebih berusaha lagi dalam dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam, serta pengembangan potensi-potensi baru yang ada di daerah. Pemerintah Kabupaten Minahasa juga harus memperhatikan dalam pengalokasian dana. Jangan hanya terfokus pada belanja tidak langsung khususnya belanja pegawai. Masi ada belanja-belanja lain yang masi sangat membutuhkan alokasi dana. Serta meningkatkan terus kinerja pengelolaan terhadap realisasi anggaran pendapatan dan belanja darah, agar Kabupaten MINahasa mampu menjadi daerah yang mandiri tanpa ketergantungan yang besar terhadap bantuan pemerintah pusat maupun provinsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Ramla. 2014. *Analisis Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran Pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara*. Universitas Sam Ratulangi. (<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/download/2651/2204>). Diakses tanggal 05 Desember 2016.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Erlangga. Jakarta
- Budidarma. 2010. *Anggaran Pendapatan Belanja Daerah*.
- Gita Soraya. 2014. *Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Badan Pertanahan Nasional Wilayah Sumatera Selatan*. Jurnal, Hal 1-10. STIE Multi Data Palembang. (<http://eprints.mdp.ac.id> > Jurnal). Diakses tanggal 06 Desember 2016
- Hariadi Pramono, Yanuar Restianto. 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Purwokerto
- Indriani Yulia Friska. 2013. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja dengan Komitmen Organisasi sebagai Variable Moderating* (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi). Jurnal, Hal 75-81. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. (<http://online-journal.unja.ac.id> > article > view). Diakses tanggal 06 Desember 2016
- Komang Sri Endrayan. 2014. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* (Studi Kasus pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah Kota Singaraja). e-journal S1 Ak Volume 2 No. 1 Tahun 2014 Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1. (<http://e-journal.undiksha.ac.id> > article > view). Diakses tanggal 06 Desember 2016.
- Korompot, Riska. 2015. *Analisis Penyusunan Anggaran Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014*. Universitas Sam Ratulangi Manado. (<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/7612>). Diakses tanggal 06 Desember 2016.
- Mursyidi. 2010. *Akuntansi Dasar*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Nordiawan Deddi. Iswahyudi Sondi Putra. Maulidah Rahmawati 2012. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sadeli, Lili. 2015. *Dasar-Dasar Akuntansi. Edisi Pertama*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sujarweni Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Taufiqurrahman. 2014. *Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja di Pemerintahan Daerah: Tantangan dan Hambatan*. Jurnal. Tahun VI, No. 2, Hal 511-519 Juli-Desember 2014. Universitas Airlangga Surabaya, Jejaring Administrasi Publik. (<http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-admp9cde02ab1e2full.pdf>). Diakses tanggal 05 Desember 2016.
- Wiwik Andriani. 2012. *Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Pusat (Studi pada politeknik negeri padang)*. Jurnal. Akuntansi & Manajemen Vol 7 No.2 Hal 24-35. Desember 2012 ISSN 1858-3687. (<http://repo.polinpdg.ac.id/457/1/583-573-1-PB.pdf>). Diakses tanggal 05 Desember 2016.
- Yohanes Y. Subiyantoro. 2011. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) kotamojokerto*. Jurnal, Hal 17-26. Program Studi/Jurusan Sistem Informasi. STIKOM Surabaya. (<http://sir.stikom.edu/493/>). Diakses tanggal 06 Desember 2016